

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Internasional. Politik luar negeri Amerika menjadi hal yang dinantikan oleh setiap negara yang bermitra dengan negara adidaya tersebut. Bukan hanya negara yang menjadi mitra Amerika, negara yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan Amerika ataupun negara yang menjadi saingan Amerika dalam dunia Internasional juga menantikan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh negara Paman Sam tersebut. Amerika identik dengan dua partai yang mempunyai pengaruh besar dalam proses kebijakan negaranya, yaitu partai demokrat dan partai republik.

Kedua partai ini saling bersaing dalam menempatkan wakil mereka dalam posisi tertinggi di pemerintahan. Pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu menjadi perhatian dunia internasional. Hal itu karena Amerika muncul dan dianggap sebagai ukuran sebuah negara ideal di dunia. Sekaligus juga diklaim sebagai negara yang memimpin peradaban dunia saat ini, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Maka dari itu pemilihan orang nomer satu di negeri Paman Sam tersebut seolah ajang pemilihan *President of the world*. (Sahide, 2017)

Politik luar negeri Amerika juga menjadi perhatian khusus bagi negara-negara yang berada di semenanjung Arab. Negara *superpower* ini dikenal sebagai negara yang mempunyai pengaruh besar dalam berbagai aspek di dunia. Banyak dari negara

yang berada di kawasan Timur Tengah mempunyai hubungan baik dengan negara Amerika. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian dari politik luar negeri Amerika. Politik luar negeri Amerika terhadap kawasan yang mayoritas berpenduduk Muslim ini sudah berlangsung lama. Amerika dikenal mempunyai kepentingan dari sektor ekonomi dan penyebaran ideologi negaranya. Salah satu negara yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika yaitu Arab Saudi. Negara yang dipimpin oleh Raja Salman ini mempunyai kerjasama yang erat dengan negara Paman Sam. Hubungan kerjasama perdagangan dibidang energi, minyak dan investasi dibidang lainnya menjadikan kedua negara ini mempunyai hubungan yang erat. Bukan hanya Arab Saudi yang menjadi rekan baik Amerika di Timur Tengah tetapi, ada juga negara yang mayoritas penduduknya merupakan kaum Yahudi, yaitu Israel yang dikenal sebagai representasi ataupun perpanjangan tangan Amerika di kawasan Timur Tengah. (Gerges, 2002)

Tidak semua negara yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika dapat mempertahankan stabilitas negaranya. Negara seperti Tunisia, Libya dan Mesir merupakan negara yang sebelumnya berada dibawa rezim pemerintahan otoriter, seperti halnya rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir dan Khadafi di Libya. Negara-negara ini dikenal mempunyai hubungan baik dengan Washinton. Sampai pada akhirnya gelombang demonstran menuntut mereka turun dari jabatannya. Negara yang rezim pemerintahannya runtuh setelah bertahan sekian lama ini, memberikan dampak buruk bagi kepentingan Amerika. Akan tetapi Washinton secara hati-hati dalam mengambil tindakan. Sebagai bukti mereka tidak

mempertahankan rezim yang sudah diambang kehancuran. Mereka justru mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang akan terjadi setelah lengsernya para pemimpin ini.

Angin revolusi menerjang negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2010 hingga awal tahun 2011. Angin revolusi yang berhembus di semenanjung Arab digerakkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kediktatoran pemimpin yang berkuasa. Masyarakat yang sudah jenuh dengan pemimpin yang berkuasa serta menginginkan adanya perubahan dalam di negara mereka. Siapa sangka rentetan gelombang revolusi melanda negara-negara dengan sistem pemerintahan yang kuat bisa diruntuhkan dengan kekuatan masyarakatnya sendiri. Negara pertama yang diterjang gelombang revolusi yaitu Tunisia. Berawal dari sebuah kota kecil yang terletak sekitar 300 kilometer sebelah selatan Tunis, Tunisia. Dari kota kecil itulah lahirnya sebuah inspirasi untuk memberikan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Mohammed Bouazizi merupakan seorang pedagang sayur yang memberanikan diri dengan melakukan tindakan ekstrim, yaitu mengguyur sekujur tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya sebagai bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Semangat Bouazizi menjadi penggerak di tengah ketakutan masyarakat Tunisia terhadap pemimpinnya. Bouazizi menjadi simbol perlawanan masyarakat Tunisia terhadap pemerintah.

Gerakan revolusi yang menuntut perubahan sudah tidak bisa dibendung lagi oleh pemerintah Tunisia. Desakan menuntut Ben Ali turun dari jabatannya tidak hanya berasal dari masyarakat Tunisia, dunia Internasional juga memberikan desakan

agar pemimpin yang dikenal diktator itu melepaskan tahtanya. Pergolakan politik di Tunisia seakan memberikan harapan baru bagi masyarakat negara lain yang dipimpin oleh pemimpin yang diktator.

Mesir menjadi negara selanjutnya yang diterjang angin revolusi. Negara yang dipimpin oleh Hosni Mubarak itu juga mendapatkan perlawanan dari masyarakatnya yang menuntut dirinya untuk meninggalkan jabatannya. Setelah terjadi bentrok antara pihak pemerintahan dan kelompok masyarakat, tepat pada hari Jumat, 11 Februari 2011, Presiden Hosni Mubarak meletakkan jabatannya sebagai kepala negara yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Tidak berhenti sampai di Mesir saja, kekuasaan yang tidak pernah disentuh selama lebih dari 40 tahun di Libya ikut terkena dampak dari hembusan angin revolusi yang sebelumnya melanda Tunisia dan Mesir. Rezim Khadafy akhirnya mendapatkan tuntutan dari masyarakatnya untuk turun dari jabatannya. Angin revolusi seakan menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap kepala negara yang sudah membuat dinasti di negaranya. Akan tetapi angin revolusi menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memulai kehidupan baru, dengan pengharapan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak berselang lama Libya menjadi negara selanjutnya yang dipaksa untuk menghadapi gelombang perlawanan dari masyarakat. Khadafy harus meninggalkan jabatannya yang telah diempuhnya sangat lama. (Rachman, 2019)

Gelombang revolusi dunia Arab atau *Arab Spring*, merupakan serangkaian peristiwa gelombang revolusi yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah yang dianggap diktator dalam kepemimpinannya. Perjuangan masyarakat dalam

menghadapi pemerintahan yang selama ini dianggap tidak tersentuh menjadi fenomena tersendiri di semenanjung Arab. Perjuangan rakyat Tunisia, Mesir, Libya dan negara-negara lain akhirnya sampai di Suriah. Maret 2011, hembusan angin revolusi sampai di Suriah. Bukan Damaskus dan Aleppo akan tetapi perjuangan rakyat Suriah berawal dari kota yang berjarak 100 kilometer sebelah selatan Damaskus, di Suriah barat-daya. Deraa merupakan ibu kota Provinsi Deraa yang berpenduduk sekitar 70.000-100.000 jiwa. Dari kota inilah semangat revolusi di Suriah bermula. Perlawanan rakyat Suriah dimulai ketika aparat keamanan menangkap 15 orang siswa, demonstrasi menuntut pembebasan 15 siswa tersebut merupakan awal pergerakan dimulainya perjuangan rakyat melawan pemerintah. (Kuncahyono, 2013)

Suriah merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Negara ini berada di sebelah timur Turki dan di utara Yordania sehingga menjadikan Suriah mempunyai posisi yang strategis dalam jalur perdagangan di kawasan Arab. Suriah dipimpin oleh Bashar al-Assad yang merupakan warisan dari ayahnya Hafez al-Assad. Bashar al-Assad digadang-gadang akan membawa perubahan yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Bashar dikenal sebagai anak yang cerdas serta berpendidikan tinggi, harapan rakyat Suriah ketika ia terpilih menjadi kepala negara, Bashar diharapkan bisa lebih baik dari ayahnya serta membawa Suriah keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya saat itu seperti pengurangan angka pengangguran serta pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Setelah terpilih dan

menjalankan pemerintahannya bukan perbaikan yang dibawa oleh Bashar akan tetapi justru membuat negara makin terpuruk dan pengangguran semakin bertambah.

Perekonomian Suriah yang bergantung dari sektor minyak dan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah produksi serta penjualan minyak Suriah menurun serta produksi pertanian semakin rendah akibat pemanasan global. Suriah semakin terpuruk dibawa rezim Bashar al-Assad. Perlawanan masyarakat sudah tidak bisa dihentikan lagi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Assad memberikan respon yang berlebihan kepada masyarakat membuat demonstran semakin besar dari sebelumnya. Perlawanan yang menuntut mundurnya Bashar sudah menyebar luar hingga ke beberapa kota di Suriah. Damaskus, Aleppo serta seluruh wilayah di kawasan Suriah menjadi arena perang antara pihak pemerintah dan kelompok masyarakat.

Perang yang sedang terjadi di Suriah bukan hanya melibatkan kelompok pemberontak dan pemerintahan, tetapi pihak asing yang mempunyai kepentingan juga ikut terlibat. Walaupun pada kenyataannya yang berperang di lapangan adalah kelompok pemberontak melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Amerika salah satu negara yang terlibat dalam kontestasi di Suriah. Hal ini terbukti dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Obama yang menjabat pada saat itu menyatakan bahwa,

“The United State opposes the use of violence against peaceful protesters in Syria, and we support the universal rights of the Syrian people. We have imposed sanctions on President Assad and his government (HOUSE, 2011).

Berdasarkan pernyataan oleh Obama, Amerika memberikan perhatian kepada konflik Suriah. Tindakan Presiden Assad menurut Amerika sebagai tindakan yang melanggar kepentingan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, bahkan Amerika dan sekutunya mengecam tindakan brutal Assad. Amerika yang selama ini dianggap sebagai negara yang pro serta mendukung kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya tidak akan tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Suriah. Pembunuhan terhadap warga sipil merupakan tindakan kejam pemerintah Suriah serta mendapat kecaman dari berbagai pihak asing. Pernyataan Amerika yang menyudutkan pemerintahan Assad sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil temuan oleh tim penyidik PBB yang melaporkan bahwa sejak konflik menentang Assad pecah pada Maret 2011 diperkirakan sedikitnya 9000 orang tewas. Dalam laporan terbaru disebutkan adanya kasus penyiksaan dan pembunuhan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Laporan dari tim penyidik PBB tersebut tentunya menimbulkan spekulasi bahwa Amerika pada dasarnya mendukung pihak oposisi dalam upaya menjatuhkan Assad dari posisinya. (Indonesia, 2012)

Amerika yang menganggap konflik di Suriah merupakan hal penting dapat dilihat dari politik luar negeri negara yang berjuluk Paman Sam tersebut. Amerika yang membentuk kelompok oposisi baru bagi Suriah dan secara sepihak melegalkannya sebagai pemerintahan yang sah. Selain itu, Amerika juga memberikan dukungan berupa persenjataan dan pelatihan militer terhadap kelompok oposisi

Suriah. Disisi lain jika pihak oposisi mendapat dukungan dari Amerika maka pihak Assad juga mendapatkan dukungan dari musuh bebuyutan Amerika yaitu Rusia. Rusia dan Suriah dikenal mempunyai hubungan baik yang telah terjalin begitu lama. Hubungan kedua negara ini ditandai dengan adanya pangkalan militer Rusia yang sudah ada sejak tahun 1963 di kota pelabuhan Tartus. Sejarah mencatat bahwa, Rusia yang pada saat itu masih bernama Uni Soviet merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Kerjasama mereka semakin membaik setelah Hafez al-Assad menjabat sebagai Presiden. Menurut Rusia, Suriah merupakan mitra utama mereka dalam mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Dukungan yang diberikan Rusia berupa peralatan militer, bantuan ekonomi serta dukungan politik di pentas Internasional. (Kompas.com, 2012)

Konflik Suriah memasuki babak baru. *Arab Spring* sudah berakhir, akan tetapi musim semi belum juga berakhir. Kini konflik Suriah tidak hanya berbicara tentang perlawanan masyarakat terhadap pemerintah, pertarungan kepentingan antara tokoh-tokoh ternama dunia Internasional menjadi kisah baru yang mewarnai perang berkepanjangan ini. Amerika dan Rusia menjadi dua aktor penting yang mengambil peran vital dalam krisis di Suriah. Amerika di pihak oposisi dan Rusia di pihak pemerintah membuat kontestasi di Suriah semakin memanas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh peneliti sebagai berikut :

Mengapa Amerika Serikat mendukung kelompok oposisi Free Syrian Army dan Syrian National Coalition?

C. Landasan Teori

1. Politik Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia Internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Yanyan Mochamad Yani, 2007).

Salah satu cara memahami konsep politik luar negeri dengan jalan memisahkannya kedalam dua komponen, politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*), memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk menacapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti control atas

wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai *input* yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam proses perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer dan sosial-budaya. Kepentingan juga

didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. (Sitepu, 2011) Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional :

hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali pada kebutuhan negara atau kepentingan nasional suatu negara.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni, kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core*

values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara, namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. (Jemadu, 2008) Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang akan membetuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama. Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar '*power*' yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan itu jika telah menemui poinnya, maka negara akan merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru. Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau betul-betul merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya.

Para pakar dunia internasional baik itu H.J. Morgenthau dan Dinesh sepakat bahwa ada enam jenis kepentingan nasional. Pada awalnya Thomas W. Robinson mengklasifikasikan kepentingan nasional kedalam enam kategori besar yaitu

kepentingan utama, kepentingan sekunder, kepentingan permanen, kepentingan variable, kepentingan umum dan kepentingan khusus (Urmila Sharma, 2000). Ini adalah sebagai berikut,

1. Kepentingan Utama

Kepentingan utama adalah kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dikompromikan oleh bangsa manapun. Hal ini mencakup pelestarian identitas fisik, politik, dan budaya negara. suatu negara harus mempertahankan kepentingan utama ini.

2. Kepentingan Sekunder

Kepentingan ini kurang penting dari kepentingan utama tetapi masih sangat vital bagi negara. Kepentingan ini termasuk kepentingan perlindungan warga negara di luar negeri, dan memastikan keamanan untuk staf diplomatik yang tersebar di berbagai negara afiliasi.

3. Kepentingan Permanen

Kepentingan ini merujuk pada kepentingan jangka panjang yang relatif konstan. Kepentingan ini tunduk pada setiap perubahan yang sangat lambat salah satu contoh kepentingan permanen yakni kepentingan Amerika dalam menjaga pengaruhnya di Timur Tengah demi menjaga akses minyak demi kebutuhan negara dan negara sekutu

4. Kepentingan Variabel

Kepentingan ini merupakan kepentingan suatu bangsa yang dianggap vital untuk kebaikan nasional dalam keadaan tertentu. Kepentingan ini dapat menyimpang dari kepentingan utama dan kepentingan permanen karena kepentingan variabel sangat ditentukan oleh opini publik, kepentingan sectional, politik partisan dan moral.

5. Kepentingan Umum

Kepentingan umum suatu negara mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau dalam beberapa bidang tertentu seperti, ekonomi, perdagangan, menjaga hubungan diplomatik dan menjaga perdamaian internasional merupakan kepentingan umum setiap negara.

6. Kepentingan Khusus

Kepentingan khusus merupakan hasil logis dari kepentingan umum dan kepentingan ini didefinisikan dalam hal ruang dan waktu. Sebagai contoh kepentingan khusus India untuk mengamankan hak-hak ekonomi negara-negara Dunia Ketiga melalui pengamanan tata ekonomi internasional yang baru.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, intitusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.

2. Aplikasi Teori Politik Luar Negeri Amerika

Hasil yang telah dicapai Amerika dalam percaturan dunia internasional, membawa Amerika sebagai negara adidaya satu-satunya dalam konteks pasca-Perang Dingin. Sementara itu, kepentingan Amerika di Timur Tengah tumbuh secara eksponensial, dan keterlibatan ini terus berlanjut. Terdapat lima tujuan utama Amerika di kawasan Timur Tengah yang mencakup: mengamankan akses strategis untuk minyak di wilayah teluk, mendukung dan melindungi kedaulatan Israel, mempertahankan pangkalan militer Amerika terutama di wilayah teluk, membela klien-negara dan rezim ramah, dan menolak gerakan-gerakan Islam dan kelompok-kelompok teroris

seperti Hamas, Al-Qeada, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelima minat utama Amerika sebagai berikut:

1). Mempertahankan akses strategis untuk minyak di wilayah Teluk

Kepentingan utama Amerika di kawasan Timur tengah adalah untuk menjamin akses minyak di kawasan tersebut. Pada akhir abad ke sembilan belas dan awal abad kedua puluh, industri minyak bumi dan konsumsi produk berbasis minyak berkembang pesat di seluruh dunia terutama di Eropa dan Amerika Utara. Selama Perang Dunia I, kekuatan utama dunia mulai memprioritaskan minyak sebagai aset militer penting. Kebutuhan minyak bumi menjadi kebutuhan penting pada konteks perang modern seperti penggunaan minyak pada kapal-kapal, pesawat terbang, tank, kapal selam, dan pelumasan sanapan modern. Penggunaan minyak pada Perang Dunia I, menyebabkan krisis minyak pada tahun 1917-1918 (Paul, 2002)

2). Mendukung dan melindungi kedaulatan Israel

Kepentingan kedua Amerika di kawasan Timur Tengah adalah menjaga negara Israel dan menjamin stabilitas di wilayah tersebut. Faktanya, mempertahankan Israel yang kuat di Timur Tengah memantapkan kepentingan keamanan nasional Amerika disana. Perspektif ini telah mendominasi kebijakan politik luar negeri Amerika sejak pertengahan abad kedua puluh.

3). Mempertahankan pangkalan Amerika Serikat

Kepentingan ketiga Amerika di kawasan Timur Tengah adalah mempertahankan pangkalan militernya. Sebelum Perang Dunia II, jumlah pangkalan militer Amerika di luar negeri terbatas. Namun pada era Perang Dingin, jumlah pangkalan militer Amerika meningkat pesat di seluruh dunia. Menurut keterangan Alexander Cooley dari *United State Departement of Defense's 2006 Base Structure Report*, Amerika secara resmi mempertahankan 766 instalasi militer di luar negeri dari 77 negara di luar Amerika (Sarhan A. S., 2017).

4). Membela klien-negara dan rezim

Kepentingan keempat Amerika di kawasan Timur Tengah adalah mempertahankan hubungan dekat dengan “klien-negara” dan rezim. Dalam kamus Pemerintah dan Politik hal tersebut dapat diartikan sebagai negara yang bergantung pada negara lain untuk hal-hal seperti pertahanan, perdagangan, dll. Sementara dalam buku *The Guide to Internasional Relations and Diplomacy* klien-negara dapat diartikan sebagai negara yang secara ekonomi, politik, dan militer bergantung pada negara lain.

5). Menolak Gerakan Islam dan Kelompok Teroris

Kepentingan kelima kebijakan luar negeri Amerika di kawasan Timur Tengah yaitu melawan gerakan Islam dan kelompok-kelompok teroris. Amerika dan sekutunya mengancam invasi yang dilakukan oleh Soviet di Afghanistan pada tahun 1979. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Carter, Amerika akan melakukan

berbagai cara agar kepentingan mereka di kawasan bisa dipertahankan termasuk penggunaan militer. Hal tersebut dibuktikan oleh Amerika dan sekutunya yang memberikan bantuan dana dan persenjataan terhadap kelompok Taliban agar melakukan perlawanan terhadap Soviet. Bantuan yang diberikan Amerika dan sekutunya terhadap kelompok Taliban membuat Soviet mengalami banyak kerugian. Perang antara kelompok Taliban yang didukung oleh Amerika melawan Soviet merupakan salah satu faktor yang meruntuhkan kekuasaan Soviet di dunia. Hal ini karena kerugian besar yang dialami oleh negara komunis tersebut akibat perang berkepanjangan di Afghanistan.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik sebuah hipotesa sebagai jawaban sementara dari penelitian ini, dimana politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah pasca *Arab Spring* adalah sebagai berikut :

Amerika Serikat mendukung kelompok oposisi *Free Syrian Army* dan *Syrian National Coalition* karena adanya kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Kepentingan berikut merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat yang dirumuskan melalui politik luar negerinya terhadap Suriah.

E. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian penulis berfokus pada data antara tahun 2012-2014 dengan beberapa alasan :

1. Pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 fenomena *Arab Spring* memasuki fase klimaks dan fenomena tersebut tengah berlangsung di Suriah
2. Pada tahun 2012, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat untuk priode keduanya.
3. Pada tahun 2013, pihak pemerintah Bashar al-Assad yang sebelumnya mengeluarkan ancaman untuk penggunaan senjata kimia akhirnya merealisasikan ancamannya tersebut
4. Pada tahun 2014, intensitas konflik Suriah kian memanas dengan dukungan Amerika terhadap kelompok oposisi berhadapan dengan pihak pemerintah yang didukung oleh Rusia.

F. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran umum tentang politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afrika Utara khususnya di Suriah
2. Memberikan pengetahuan tentang situasi konflik Suriah pasca Arab Spring serta persaingan kepentingan Amerika Serikat dan Rusia.
3. Tulisan ini merupakan salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan eksplorasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah berdasarkan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, telaah Pustaka (*library research*). Penulis akan mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari literatur berupa buku, makalah, koran, artikel, jurnal, dokumen, serta situs-situs resmi yang mengkaji politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya di Suriah ataupun sumber yang terkait dengan penelitian.

3. Jenis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan penulis diatas, maka penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Data ini kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa data kualitatif.

Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan Dalam penelitian ini disebut sebagai pendahuluan dan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat secara umum dan secara khusus akan menjelaskan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Bab III, bab selanjutnya membahas tentang sikap Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Suriah. Bab ini menggambarkan tentang langkah yang diambil oleh Amerika yakni memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi dengan tujuan menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

Bab IV, bab pembahasan yaitu bab 4 menjelaskan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat yang dirumuskan melalui politik luar negerinya terhadap krisis Suriah. Selain itu, pada bab ini dijelaskan politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah pasca *Arab Spring*.

Pada bab ini membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat di Suriah pasca Arab Spring di tahun 2012-2014..

Bab V, Dalam bab ini berisi tentang penutup serta kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.